

**PENCANAAN STRATEJIK  
TAHUN 2006 - 2010**

**Instansi** : SEKRETARIAT KOTA SAMARINDA  
**Visi** : Terwujudnya Good Governance Dalam Administrasi Pemerintahan Guna Mendukung Samarinda Sebagai Kota Jasa, Industri, Perdagangan dan Pemukiman Yang Berwawasan Lingkungan.

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEBIJAKAN		
1 Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan serta Pembangunan yang Aspiratif, Transparan, Akuntabel serta Efektif dan Efisien	1.1 Terwujudnya koordinasi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, transparan, akuntabel, serta pengendalian pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien	1.1.1 Terciptanya koordinasi kebijakan pembinaan keagamaan, pendidikan, ketenagakerjaan, Pemuda Olah Raga, Sosial Budaya dan Peranan Wanita	- Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) (kali)	1 Mewujudkan koordinasi peningkatan kualitas, peran dan kemandirian masyarakat	1	
			- Sosialisasi Ekonomi Kerakyatan (kali)			2
			- Bantuan Pendidikan kepada Masyarakat yang disalurkan (%)			3
			- Bantuan kepada Lembaga Keagamaan yang disalurkan (%)			4
		1.1.2 Terciptanya koordinasi kebijakan bidang kehumasan dalam menunjang peningkatan akses dan sebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	- Anak Putus Sekolah yang dilatih (%)			5
			- Pemuda dan pelajar berprestasi yang terlatih kewirausahaan (org)			
		1.1.3 Terciptanya koordinasi kebijakan masalah hukum dan peraturan perundangan	- Terlaksananya Porseni Pemuda Tk. Kota Samarinda (keg)			
			- Keluarga Sakinah Tk Kota Samarinda yang terpilih (klg)			
		1.1.4 Terciptanya koordinasi kebijakan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah	- Jumlah kerjasama dengan media cetak dan elektronik (buah)			2
			- Perda Penyiaran disahkan (buah)			7
	- informasi kegiatan dan kebijakan Pemkot Samarinda secara online sistem (%)	8				
	- informasi dan promosi dalam Website Kota Samarinda yang up to date (%)	8				
	- Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan daerah dibidang penyelenggaraan dan pembangunan (%)	3				
	- Tersedianya Produk Hukum Daerah (%)	9				
	- Tingkat Penyelesaian Pemkot di Pengadilan (%)	4				
	- Kepala Keluarga miskin mendapat beras dengan harga murah (%)	5				
		10				

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEBIJAKAN	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terselenggaranya Kegiatan Pameran dan Promosi (keg)</li> <li>- Penambahan PAD dari Retribusi Surat Ijin Usaha (%)</li> </ul>	6 Memberikan kemudahan pelayanan proses perizinan dan berinvestasi	11
		1.1.5 Terciptanya koordinasi kebijakan tentang pembinaan tata pemerintahan daerah bawahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kejelasan batas masing-masing wilayah kecamatan/kelurahan (%)</li> <li>- Data Kecamatan Dalam Angka (buku)</li> <li>- Pemekaran Kecamatan (%)</li> <li>- LKPJ da LPPD tepat waktu (%)</li> <li>- Monografi Kecamatan (buku)</li> <li>- Evaluasi Tugas Camat (%)</li> <li>- Data Otonomi Daerah (buku)</li> <li>- Tertib adm pemerintahan skpd (%)</li> </ul>	7 Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan daerah bawahan	12
		1.1.6 Terciptanya koordinasi kebijakan organisasi, kelembagaan dan tata laksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisasi Perangkat Daerah sesuai perundangan yang berlaku (%)</li> <li>- Struktur Organisasi Perangkat Daerah tersusun (%)</li> <li>- Data Kewenangan Pemerintah Kota tersedia (buku)</li> <li>- Pengembangan dan Penetapan Status Kelembagaan (%)</li> <li>- Kedisiplinan PNS dalam Berpakaian Dinas meningkat (%)</li> <li>- Standar Pelayanan Prima tersusun (%)</li> <li>- Mekanisme Kerja dan Tupoksi Perangkat Daerah tersusun (%)</li> <li>- Monev Pelaksanaan Pelayanan Publik terlaksana (Keg)</li> <li>- Jumlah SKPD telah menyusun Renstra, Renja, PK dan LAKIP (%)</li> <li>- Data Aparatur Perangkat daerah tersusun dan terevaluasi (%)</li> <li>- Ketepatan Penempatan Jabatan dan beban kerja Pegawai Pemerintah Kota (%)</li> </ul>	8 Memperkuat kelembagaan dan kelengkapan struktur organisasi yang didasarkan pada peraturan dan kebutuhan pemerintah daerah	13 14
		1.1.7 Terciptanya koordinasi dan pengendalian tugas penyelenggaraan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monev Pelaksanaan Kegiatan pembangunan (%)</li> </ul>	9 Meningkatkan efektifitas koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	15
		1.1.8 Terciptanya koordinasi kebijakan bidang pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem Informasi Pertanahan Kota Samarinda yang akurat dan lengkap (%)</li> <li>- Jumlah penyelesaian konflik pertanahan (%)</li> </ul>	10 Meningkatkan tertib administrasi pertanahan yang didukung dengan sistem informasi pertanahan yang handal	16

MISI		TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEBIJAKAN						
2	Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintah Kota	2.1	Terwujudnya pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel	2.1.1	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Keuangan daerah	- Data Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang valid up to date (%)	11	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan lebih transparan dan akuntabel	17		
						- Analisa Standar Belanja tersusun (buku)			18		
						- Standar Satuan Harga tersusun (Buku)					
								- Kebijakan akuntansi pemerintah daerah tersusun (%)			
								- Manual sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah tersusun (%)			
								- Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (%)			
						- Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi (%)					
						- APBD tepat waktu (%)					
						- Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berbasis komputer (%)					
						- Menurunnya Jumlah dan Nilai temuan BPK terkait dengan administrasi dan keuangan (%)					
						- Meningkatnya Opini BPK atas Laporan Keuangan Kota Samarinda s.d. WTP (%)					
						- Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu (%)					
						- jumlah investasi daerah (%)					
				2.1.2	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan barang daerah	- Data aset/ barang daerah yang valid dan up to date (%)			19		
						- Jml Aset hasil Revaluasi/ appraisal (%)					
						- Jml Sarana dan Prasarana Aparatur yang tersedia secara memadai (%)			20		
		2.2	Terwujudnya pembinaan aparatur yang profesional	2.2.1	Meningkatnya Kualitas Aparatur	- Jumlah Pegawai Naik Pangkat tepat waktu (%)	12	Meningkatkan tertib administrasi kepegawaian yang didukung sistem yang terintegrasi	21		
						- Jumlah Pelanggaran disiplin pegawai menurun (%)					
						- Jumlah Bantuan Tugas Belajar Pegawai (%)			22		
						- Penambahan Jml Pegawai (%)					
						- Sistem adm kepegawaian (%)					

<b>PROGRAM</b>
Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan KB
Penyaluran Bantuan Masyarakat
Peningkatan/Pembinaan Usaha
Peningkatan Peranan Pemuda dan Olah Raga
Pembinaan Keluarga
Program Kerjasama dengan Mass Media
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Kemandirian Bidang Ekonomi

<b>PROGRAM</b>
Pengelolaan Perijinan di Bidang Transportasi, Energi (BBM) dan Kehutanan
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Program Pengembangan Kelembagaan
Program Ketatalaksanaan
Program Analisa Formasi Jabatan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

<b>PROGRAM</b>
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Administrasi dan Pengembangan Kepegawaian
Program peningkatan disiplin aparatur
Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas